Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA INFORMAL DI TAMAN BERMAIN WARNA-WARNA MARTUBUNG MEDAN LABUHAN

Gilberto Ronaldi

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : gilbertoronaldisaragih@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja di sektor formal maupun informal menghadapi berbagai hambatan dan risiko sosial yang dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan, kesehatan, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan mereka beserta keluarga. Pekerja informal, yang sering kali bekerja di luar jaminan sosial formal, memiliki risiko tinggi namun kurang mendapat perlindungan memadai. Pemerintah Indonesia menciptakan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan memberi perlindungan sosial berupa asuransi bagi seluruh pekerja. Namun, tingkat partisipasi pekerja informal dalam program ini masih rendah, yang menjadi latar belakang penelitian ini.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada pedagang kaki lima di Taman Bermain Warna-Warna Martubung, Medan Labuhan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pekerja informal dan petugas BPJS, serta dokumentasi kebijakan terkait. Model implementasi yang digunakan adalah model David C. Korten yang menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan program, pelaksana, dan kelompok sasaran dalam memastikan efektivitas pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program BPJS Ketenagakerjaan telah disosialisasikan di lokasi, banyak pedagang yang belum memahami manfaat dan tata cara pendaftaran program tersebut secara lengkap. Kendala utama meliputi terbatasnya sosialisasi langsung oleh petugas, jumlah petugas yang minim dalam mengedukasi masyarakat, dan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manfaat program jaminan sosial. Selain itu, faktor sosial budaya dan kondisi ekonomi pekerja informal juga menjadi hambatan dalam partisipasi program.Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan strategi komunikasi dan pendekatan yang lebih partisipatif berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat informal. Kemudahan akses pendaftaran serta peningkatan pendampingan dari petugas lapangan juga sangat penting untuk mengoptimalkan jangkauan dan efektivitas program. Dengan peningkatan tersebut, partisipasi pekerja informal dapat meningkat sehingga perlindungan sosial dapat lebih meluas dan berdampak positif pada kesejahteraan pekerja informal.

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI : **10.9765/Krepa.V218.3784**
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Krepa.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, pekerja informal, jaminan sosial, implementasi program, David C. Korten.

Abstract

Workers in both the formal and informal sectors face various social barriers and risks that can have a significant impact on their safety, health, livelihoods, and welfare, as well as that of their families. Informal workers, who often work outside the formal social security system, are at high risk but receive inadequate protection. The Indonesian government created the BPJS Ketenagakerjaan program as a form of social security for employment, which aims to provide social protection in the form of insurance for all workers. However, the participation rate of informal workers in this program is still low, which is the background for this study. This study aims to describe and analyze the implementation of the BPJS Ketenagakerjaan program, particularly among street vendors at Taman Bermain Warna-Warna Martubung, Medan Labuhan. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection through direct observation, in-depth interviews with informal workers and BPJS officers, and documentation of related policies. The implementation model used is David C. Korten's model, which focuses on the alignment between program policies, implementers, and target groups to ensure effective implementation. The results of the study show that although the BPJS Ketenagakerjaan program has been socialized at the location, many vendors do not yet fully understand the benefits and procedures for registering for the program. The main obstacles include limited direct socialization by officials, the small number of officials educating the public, and the low level of public trust in the benefits of social security programs. In addition, socio-cultural factors and the economic conditions of informal workers also hinder participation in the program. This study recommends the need to improve communication strategies and a more participatory community-based approach to increase the understanding and trust of the informal community. Ease of access to registration and increased assistance from field officers are also crucial to optimizing the program's reach and effectiveness. With these improvements, informal workers' participation can increase, thereby expanding social protection and positively impacting the welfare of informal worker.

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan, informal workers, social security, program implementation, David C. Korten.

PENDAHULUAN

Menurut Berdasarkan Undang-Undang Pekerja baik yang tergolong formal maupun informal dalam menjalankan aktivitasnya selalu menghadapi berbagai hambatan serta risiko sosial dan ekonomi yang dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan, kesehatan, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan mereka beserta keluarganya. Pekerja informal, khususnya, merupakan kelompok yang rentan karena tidak memiliki

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

perlindungan jaminan sosial yang memadai. Mereka rentan terhadap kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, dan risiko sosial lainnya akibat kurangnya jaminan sosial yang terstruktur. Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi pekerja informal menjadi tuntutan mendesak dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial nasional.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja, Pemerintah Indonesia melalui program BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai upaya untuk memberikan jaminan sosial berupa asuransi ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Program ini mencakup berbagai manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang diharapkan dapat memberikan keamanan sosial bagi pekerja. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pekerja informal dalam program ini masih sangat rendah. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat risiko kerja yang dihadapi pekerja informal sering kali tidak kalah berat dibandingkan pekerja formal.

Penelitian ini berfokus pada implementasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal yang beraktivitas di Taman Bermain Warna-Warna Martubung, Medan Labuhan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pusat aktivitas pedagang kaki lima dengan aktivitas ekonomi yang dinamis namun sekaligus rawan terhadap berbagai risiko kerja dan sosial. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi berbagai program perlindungan sosial, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat informal terhadap program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di tingkat masyarakat.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan ini berjalan di kalangan pekerja informal dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengedepankan model implementasi David C. Korten, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara program, pelaksana, dan sasaran dalam keberhasilan implementasi program sosial.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mendalam mengenai kondisi aktual di lapangan, tantangan yang dihadapi oleh para pekerja informal dalam mengakses program BPJS Ketenagakerjaan, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sosial di masyarakat.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan berjalan pada kelompok pekerja informal di lokasi penelitian. Deskriptif karena laporan hasil penelitian berfokus pada pemaparan fakta dan keadaan nyata di lapangan mengenai pelaksanaan program tersebut tanpa melakukan eksperimen. Dapat disimpulkan bahwa Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mengeksplorasi, dan menggali makna serta pengalaman subjektif dari partisipan terkait dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sangat tepat untuk mempelajari topik-topik yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Taman Bermain Warna-Warna Martubung, Medan Labuhan, yang merupakan lokasi aktif para pekerja informal pedagang kaki lima. Pemilihan lokasi ini relevan karena menjadi pusat aktivitas ekonomi informal sehingga relevan untuk melihat implementasi program sosial tenaga kerja yang ditargetkan kepada pekerja informal.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah para pelaku pekerja informal pedagang kaki lima di lokasi taman bermain serta petugas BPJS yang terkait dengan sosialisasi dan pengelolaan program di wilayah tersebut. Pemilihan informan berdasarkan purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi penting dan representatif terkait dengan tema penelitian.Dalam penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2016). Teknik puposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, misalnya orang yang dipilih karena dianggap paling tahu tentang hal yang akan diteiti atau karena dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/siatuasi sosial yang hendak diteliti. Pada penelitian ini ada tiga informan yang digunakan yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informan) adalah orang yang memiliki pengetahuan lebih terkait permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci pada penelitian ini adalah pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan yang bertugas di bidang kepesertaan yaitu staff account representative.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

2. Informan Utama, adalah orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang sedang diteliti. Informan Utama dalam penelitian ini adalah 6 orang pedagang kaki lima yang menjadi objek utama dalam peneliitian ini
3. Informan Tambahan, adalah orang yang memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang sedang diteliti meskipun tidak terlibat secara langsung yaitu pemerintah setempat yaitu kepala lingkungan X,Martubung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja informal di Taman Bermain Warna-Warna Martubung, Medan Labuhan, dianalisis menggunakan model implementasi program David C. Korten yang menekankan kesesuaian antara program, pelaksana, dan kelompok sasaran.

1. Kesesuaian Program

Program BPJS Ketenagakerjaan secara substansi telah mencakup kebutuhan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal, melalui tiga skema utama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi program belum sepenuhnya dipahami oleh pekerja informal di lokasi penelitian. Sebagian besar pedagang kaki lima belum mengetahui manfaat maupun prosedur pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan informasi dan kapasitas penerima manfaat.

2. Kesesuaian Pelaksana Program

Pelaksana program yakni BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara telah menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta melalui berbagai metode, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah dan kegiatan promosi langsung. Akan tetapi, jumlah petugas yang terbatas dan cakupan sosialisasi yang belum merata menghambat efektivitas pelaksanaan. Selain itu, kurangnya sinergi antara BPJS dengan perangkat kelurahan dan komunitas pedagang membuat proses penyampaian informasi tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pelaksana belum sepenuhnya sesuai dengan kompleksitas kebutuhan kelompok sasaran.

3. Kesesuaian Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yakni pekerja informal (pedagang kaki lima) di Taman Bermain Warna-Warna memiliki karakteristik sosial ekonomi yang unik. Sebagian besar berpendidikan menengah ke bawah dengan penghasilan tidak tetap, sehingga kemampuan membayar iuran menjadi kendala utama. Selain itu,

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

masih terdapat rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara jaminan sosial karena kurangnya bukti nyata manfaat langsung yang mereka rasakan. Hal ini menandakan bahwa program belum mampu membangun rasa memiliki (sense of belonging) di kalangan pekerja informal.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi program antara lain adanya komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan serta dukungan regulasi nasional melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sementara faktor penghambat mencakup minimnya sosialisasi, rendahnya literasi sosial, keterbatasan ekonomi pekerja informal, serta kurangnya integrasi data antara pemerintah daerah dan BPJS.

5. Implikasi terhadap Kesejahteraan Sosial

Implementasi BPJS Ketenagakerjaan berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan pekerja informal dengan memberikan jaminan atas risiko sosial, seperti kecelakaan kerja dan kematian. Namun, realisasi manfaat ini bergantung pada efektivitas implementasi di lapangan. Rendahnya partisipasi pekerja informal mengindikasikan masih perlunya transformasi pendekatan program dari birokratis menjadi partisipatif, di mana pekerja menjadi subjek aktif, bukan hanya objek kebijakan.

6. Upaya Perbaikan

Agar implementasi lebih efektif, diperlukan:

1) Peningkatan strategi komunikasi sosial berbasis komunitas.
2) Kolaborasi lintas sektor antara BPJS, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan usaha.
3) Skema iuran fleksibel bagi pekerja informal dengan pendapatan tidak tetap.
4) Pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran iuran.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Taman Bermain Warna-Warna Martubung, Medan Labuhan belum berjalan optimal. Berdasarkan model implementasi David C. Korten, masih terdapat ketidaksesuaian antara elemen program, pelaksana, dan kelompok sasaran. Dari sisi program, sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai manfaat serta prosedur BPJS Ketenagakerjaan belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh. Dari sisi pelaksana, keterbatasan jumlah petugas dan kurangnya pendekatan langsung ke komunitas pekerja menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi. Sementara dari sisi kelompok sasaran, sebagian besar

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

pekerja informal belum memahami manfaat jaminan sosial dan masih menganggap pembayaran iuran sebagai beban ekonomi.

Kendala utama dalam implementasi meliputi rendahnya literasi sosial pekerja informal, minimnya strategi komunikasi berbasis komunitas, serta belum adanya mekanisme khusus untuk mempermudah pendaftaran peserta dari sektor informal. Meski demikian, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan dampak positif bagi sebagian pekerja yang sudah menjadi peserta, terutama dalam memberikan rasa aman terhadap risiko kerja dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial.

SARAN

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

   BPJS Ketenagakerjaan perlu memperluas jangkauan sosialisasi melalui pendekatan langsung di lingkungan kerja informal, seperti pusat kuliner, pasar, dan taman bermain, dengan metode komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Kolaborasi Antar Pihak

   Diperlukan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dalam mendata serta mendampingi pekerja informal untuk mengikuti program jaminan sosial.

3. Kemudahan Akses dan Mekanisme Pembayaran Iuran

   BPJS Ketenagakerjaan disarankan mengembangkan sistem pendaftaran dan pembayaran iuran yang lebih fleksibel, misalnya berbasis aplikasi digital atau sistem cicilan ringan yang menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi pekerja informal.

4. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan

   Diperlukan pelatihan dan penambahan jumlah petugas lapangan agar dapat menjangkau kelompok pekerja informal dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Pendekatan Komunitas Berbasis Kesejahteraan

   Strategi implementasi perlu menekankan pemberdayaan masyarakat agar pekerja informal tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga memahami nilai jaminan sosial sebagai bagian dari kesejahteraan bersama.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 3 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Bumi Aksara.

Bronson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. (2018). "Evidence-Based Public Health: A Fundamental Concept for Public Health Practice." Annual Review of Public Health, 29, 175-201.

Creswell, J.W. (2014). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.

Effendi, T.N. dan Manning, C. 1995. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.

Moleong, L. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Qomaruddin. (2012). Badan Hukum Publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Transformasinya Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Legislasi Indonesia, Vol. 9 No.(24), 1–16.

Soewartoyo, dkk, 2013. “Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal,” Yogyakarta:Lokus.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta CV

Triyono, d. (2019). Perluasan Akses dan Partisipasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Mendukung Produktifitas Penduduk. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." Administration & Society, 6(4), 445-488.

Andani, D., Setyowati, N., & Amin, M. (2019). Implementasi Kebijakan Publik. Pustaka Mandiri.

Barid, Vera. (2021). Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Indonesia.

Dewi,(2015),implementasi program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan kerja oleh badan penyelenggara jaminan sosial(BPJS) Ketenagakerjaan di kabupaten tanggerang. Repsitory Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Habibbulah (2016) Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di kota Tangerang Ismawati, E., Hakim, L., & Syukri, I. (2023). Implementasi Kebijakan: Perspektif dan Studi Kasus. Insan Cendekia.

Mamonto, H. M., Sumampouw, F. A., & Undap, A. (2018). Dinamisasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik. Graha Ilmu.

Simon, J. (2017). Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan. Publik Reform: Jurnal Administrasi Publik, 2(2).

Putera, R. E. (2023). Implementasi Pprogram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Padang. Journal of Social and Policy Issues.

Ambarwati, S., Triyono, A., & Sos, S. (2013). Isu Perusahaan Dalam Konstruksi Media (Analisis Framing Pemberitaan Tentang Isu Ketidakmerataan Program CSR oleh Pabrik Aqua Kepada Warga Polanharjo di Harian Umum SOLOPOS pada Bulan Desember 2012)" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Rahmat Adi Prasetyo,Afifa Nur Chabiba,Setya Haksama(2021) Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan terhadapKepemilikan BPJS Ketenagakerjaan Pada Relawan Penanggulangan Bencana Gunung Semeru Tahun 2021

Septy Nadyadiva Pristanti, Sukidin, Wiwin Hartanto (2022). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Pekerja Informal (Studi kasus di Desa Dukuhdempok,Kecamatan Wuluhan,Kabupaten Jember)

Wahab, S. A. (2004). Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya. Bumi Aksara.

BPS Sumatera Utara. (2022). Sumatera Utara dalam persentase 2022. Badan Pusat Statistik Sumut.

JawaPos. (2024, Desember 17). Banyak UMKM Belum Pham BPJS Ketenagakerjaan. Ekonomi.

Medan, P. (2024, Juli 02). Di Hari Jadi Kota Medan ke 343 Dinasker Medan Beri Kado Istimewa Kepada 14 Ribu Pekerja Informal. Pekerja Informal Kota Medan.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta CV.

Tirto. (2022, Desember 8). Sinkronisasi Data jadi Kunci Penyusunan Kebijakan Tepat. Badan Statistik.

Undang- Undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyekenggara Jaminan Sosial

Undang Undang Tahun 1945 no 28 H tentang jaminan Sosial

Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial Pasal 33

Aris, w. (2023). BPJS Ketenagakerjaan Dongkrak Kepesertaan dari Sektor Informal. Solo: BPJS Ketenagakerjaan.id

BPJS Ketenagakerjaan (2024). Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/